



BELUM ADA SOLUSI

- Sebelumnya para pedagang sempat dijanjikan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan guna mencari solusi terbaik bagi pedagang yang terdusur.
- Namun hingga saat ini, janji tersebut urung ditepati.
- Sepengetahuan mereka, para pemilik toko telah memiliki surat kekancingan.
- Para pemilik kios menyewa kepada pihak kedua yang mengklaim memiliki surat kekancingan.
- Namun, kekancingan itu tidak diperpanjang sejak 2000.



GRAFIK: HERPPI KARTUN/RADAR JOGJA

Pedagang Perwakilan Ancam Buka Paksa Segel Toko

Sumadi: Jika Dilakukan, Itu Pelanggaran Hukum dan Bisa Dituntut Pemilik

JOGJA, Radar Jogja - Belum dapat kepastian akan nasib pasca

ditertibkan, para pelaku usaha di Jalan Perwakilan Jogja mengancam akan membuka paksa segel kios atau pertokoan yang ditempel Satpol PP Kota Jogja pada Rabu (4/1) ■

► *Baca Pedagang... Hal 7*

Pedagang Perwakilan Ancam Buka Paksa Segel Toko

Sambungan dari hal 1

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adikusuma mengatakan, sejatinya para pedagang menghormati keputusan pemkot untuk direlokasi. Namun hingga saat ini mereka belum bisa berdialog dengan pejabat di pemkot untuk mendapatkan solusi atas masalahnya.

Sebelumnya para pedagang sempat dijanjikan oleh pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan guna mencari solusi terbaik bagi pedagang yang terdusur. Namun hingga saat ini, janji tersebut urung kunjung ditepati.

"Jadi di sini kita ya menunggu, paling tidak tiga hari lah. Coba kita tunggu ikhtid baik dari pemerintah. Tetapi jika memang tetap tidak ada solusi, ya kami akan nekat bertahan karena kami juga punya keluarga dan karyawan," katanya kemarin (5/1).

Adi menjelaskan selama ini mereka juga menjadi korban karena sepengetahuannya para pemilik toko telah memiliki surat kekancingan. Para pemilik kios menyewa kepada pihak kedua yang mengklaim memiliki surat kekancingan. Namun

pihaknya baru mengetahui jika surat kekancingan itu sebenarnya tak diperpanjang sejak 2000.

Mereka juga mempertanyakan langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah, mengapa membiarkan para pedagang untuk tetap berjualan meski pihak Keraton Jogja tak memperpanjang izin kekancingan sejak 2000 lalu. Terkait hal ini, pihaknya pun kebingungan meminta pertanggung jawaban kepada siapa.

Adi mengaku juga pernah mendapat instruksi dari almarhum KGPH Hadiwinoto yang dulu menjabat Pengageng Kawedanan Hageng Punakawan Parastra Budaya di Keraton Jogja. "Kami di sini tak lepas dari kebijakan Gusti Hadi, cuma itu *kan* tidak semuanya tahu," jelasnya.

Terkait uang sewa yang dibayarkan, nominalnya beragam tergantung jangka waktu menyewa. Untuk harga sewa bulanan rata-rata mencapai Rp 12 juta. Sementara untuk tahunan sekitar Rp 70 juta hingga Rp 200 juta.

Beberapa pedagang juga telah mengontrak hingga 2023 dan 2024. "Kami sebenarnya mau ditata, cuma yang jadi masalah kami tidak

diberi ruang dialog. Mau direlokasi di mana, lalu solusinya bagaimana. Jadi *kan* buntu," tambahnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan, pemkot jauh-jauh hari sudah mensosialisasikan relokasi pedagang di Jalan Perwakilan. Bahkan sejak Agustus 2022 lalu dengan memberikan alternatif relokasi di lantai atas Pasar Beringharjo atau Pasar Klitikan. "Kok solusi belum ada *gimana*, *le kondo sopo* (yang bilang siapa). Saya sudah *wiwit* (sejak) Agustus (2022) sudah sosialisasi," katanya.

Menurutnya, terkait niat untuk membuka paksa segel kios yang akan dilakukan pedagang, hal itu sebagai salah satu pelanggaran hukum. Apalagi mereka berdagang di kawasan itu secara ilegal yakni di tanah kasultanan atau Sultan Ground (SG). Karenanya Keraton Jogja sebagai pemilik tanah bisa menuntut pedagang secara hukum.

"Buka paksa (segel)? *Niku wong reti aturan mboten e* (orang itu tahu aturan apa tidak), *ajeng buka paksa. Wong jelas manggon* (tinggal) di situ saja dari hape hukum bisa dituntut, penguasaan tanpa hak. Pemerintah sudah sabar *lho*, tambahna. (wia/laz/lj)"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005